

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA MANADO

IRFAN AMU

FLORENCE D. J. LENGKONG

GUSTAAF B. I. TAMPI

Irfanamu98@gmail.com

ABSTRACT

HIV control in Indonesia has been noted to have improved from its implementation. Various HIV services have grown and the number of people using them has also increased rapidly. This led the Health Minister issued a Health Minister Regulation No. 21 of 2013 on HIV/AIDS prevention. But, as practice, every region has a yearly rise in HIV/AIDS cases. The purpose of the study is to find out how implementation of the HIV/AIDS prevention policies in Manado can be. The experimental concept used in this research is to take a kind of qualitative research with a descriptive approach. Then data-collection techniques will done by interviews, observations and documentaries. The technique for data-analysis in this research used Miles' and hubennan's qualitative data analysis. The results showed that the implementation of HIV / AIDS prevention policies in Manado was classified as good in terms of communication between the government and the targets that had been carried out, but for human resources in HIV/AIDS prevention it was still considered to be less than optimal. Whereas with a very supportive sense of execution, and SOP that conforms to health care standards and has associated coordination with stakeholders. So it should be concluded that the implementation of the HIV/AIDS prevention policies in Manado has not been fully implemented.

Keywords : Policy Implementation, Prevention, HIV / AIDS

ABSTRAK

Pengendalian HIV di Indonesia telah tercatat memiliki kemajuan dari pelaksanaannya. Berbagai layanan HIV telah berkembang dan jumlah orang yang memanfaatkannya juga telah bertambah dengan pesat. Hal ini membuat Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Menkes No.21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Tapi dalam pelaksanaannya setiap daerah selalu mengalami peningkatan kasus HIV/AIDS setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado. Konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif Miles dan Hubennan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado tergolong baik dilihat dari komunikasi antara pemerintah dan target sasaran sudah terlaksana, namun untuk sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS masih tergolong kurang optimal. Padahal dengan sikap pelaksana yang sangat mendukung, serta SOP yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan memiliki kordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penanggulangan, HIV/AIDS

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan suatu virus dan penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya serta tingkat laju perkembangan yang

sangat pesat secara global. Human Immunodeficiency Virus (HIV) ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan

tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi jika virus ini terus menyerang tubuh lama kelamaan tubuh kita akan menjadi lemah. Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

Di Indonesia, sejak kasus HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1987, HIV tersebar di 368 dari 497 kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV/AIDS di Indonesia. Data dari United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) pada tahun 2018 yaitu mencapai 640.000 orang hidup dengan HIV/AIDS. Kejadian HIV jumlah infeksi HIV baru di antara populasi yang rentan selama waktu tertentu di antara semua orang dari segala usia adalah 0,17%. Prevalensi HIV/AIDS persentase orang yang hidup dengan HIV di antara orang dewasa (15-49 tahun) adalah 0,4%. Total 46.000 orang baru terinfeksi HIV dan 38.000 orang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Jumlah kematian terkait AIDS telah meningkat 60% sejak 2010, dari 24.000 kematian menjadi 38.000 kematian. Namun, jumlah infeksi HIV baru telah menurun, dari 63.000 menjadi 46.000 pada periode yang sama.

Pada beberapa tahun terakhir telah tercatat kemajuan dari pelaksanaan program pengendalian HIV di Indonesia. Berbagai layanan HIV telah berkembang dan jumlah orang yang mememanfaatkannya juga telah bertambah dengan pesat. Walaupun data laporan kasus HIV dan AIDS yang dikumpulkan dari daerah memiliki keterbatasan, namun bisa disimpulkan bahwa peningkatan yang bermakna dalam jumlah kasus HIV yang ditemukan dari tahun 2018. Dari 640.000 orang dewasa yang hidup dengan HIV, 220.000 (35,48%) adalah perempuan. Infeksi HIV baru di kalangan wanita muda berusia 15-24 tahun adalah lebih

dari setengah di antara pria muda 9600 infeksi baru di antara wanita muda, dibandingkan dengan 14.000 di antara pria muda. Pengobatan HIV adalah sama antara perempuan dan laki-laki, dengan 17% perempuan dewasa dan laki-laki dewasa hidup dengan HIV pada pengobatan (UNAIDS, 2018).

Kebijakan daerah yang banyak didorong oleh kebijakan pusat nyatanya belum optimal pelaksanaannya, bahkan manfaatnya belum terasa bagi kelompok yang seharusnya menjadi sasaran dan penerima manfaat. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado sudah berjalan meskipun hanya berupa sosialisasi kepada para pelajar di Kota Manado, membagikan alat kontra sepsi kepada para pekerja seks komersial, waria dan masyarakat umum, dinilai belum mampu untuk mengurangi dan menekan pertambahan HIV/AIDS di Kota Manado. Meskipun masih terdapat hal-hal yang masih harus mendapat dukungan dan kebijakan yang baru untuk mengatasi masalah tersebut, dan pemerintah belum maksimal dalam melibatkan elemen-elemen masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan dan program guna menanggulangi HIV/AIDS di Kota Manado.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado, maka peneliti tertarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam negeri. Menurut Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016: 47) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Gridle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Mulyadi 2016: 47)

Menurut Edward dalam Indiahono, Dwiyanto (2017: 31) Model implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada

implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang dimiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam program/kebijakan.

4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Konsep HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem atau memperlemah sistem kekebalan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan AIDS.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV (Hutapea 2011: 6).

Cara penularan HIV/AIDS HIV terdapat di dalam cairan tubuh orang yang telah tertular seperti darah, air mani dan getah penis (pre-cum), cairan vagina serta air susu

ibu (Hutapea, 2011: 63). Dalam bukunya Hutapea (2011: 64) mengatakan HIV dapat menular melalui perpindahan darah dari orang yang terinfeksi HIV melalui :

1. Kontak seksual, Penularan melalui hubungan heteroseksual adalah yang paling dominan dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan seksual dapat terjadi selama senggama laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Senggama berarti kontak seksual dengan penetrasi vaginal, anal (anus), oral (mulut) antara dua individu. Resiko tertinggi adalah penetrasi vagina atau anal yang tak terlindung dari individu yang terinfeksi HIV.
2. Transfusi dengan darah yang tidak melalui proses pemeriksaan (screening).
3. Transplantasi organ atau jaringan yang terinfeksi.
4. Menggunakan jarum suntik seperti jarum pada alat mentato tubuh yang tidak disterilkan atau pada pengguna narkoba jenis suntik secara bergantian.
5. Melalui silet atau pisau cukur secara bergantian.
6. Penularan dari ibu ke anak. Infeksi ini terjadi saat anak masih berada di dalam kandungan, dilahirkan dan melalui ASI yang diminum.

METODE PENELITIAN

Konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Descriptive Research). Pendekatan deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana didalam konteks penelitian ini yang hendak digambarkan adalah upaya

dalam pelaksanaan suatu program oleh suatu instansi pemerintah atau non pemerintah demi tercapainya tujuan bersama. Selain itu, pelaksanaan dari penelitian ini tidak semata mengumpulkan data saja, tetapi menganalisis, mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci sehingga dapat menginterpretasikan data-data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan metode kualitatif digunakan dengan alasan agar lebih mudah disesuaikan dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Selain itu, metode kualitatif juga dapat membangun hubungan langsung antara peneliti dengan informan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017: 4)

Menurut Sugiyono (2013: 63) langkah yang paling utama dalam penelitian yakni teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data dari Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2013: 246) yaitu aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah ditelaah, selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari keseluruhan hasil wawancara dan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan serta penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan dan penanggulangan HIV/AIDS maka penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward dalam Budi Winarno (2014:174) komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Koordinasi pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado kepada masyarakat disampaikan melalui penyuluhan, pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan HIV/AIDS.

Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado kepada KPA Kota Manado dan Masyarakat masih dinilai kurang karena terbebankan pada APBD Kota Manado. Padahal sumber dana dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado berasal dari APBD Dinas Kesehatan Kota Manado.

Konsisten dalam komunikasi akan menentukan hasil dari implementasi suatu kebijakan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi yang dimaksud dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado yaitu dalam pendistribusian obat-obat ARV di puskesmas dan rumah sakit. Dalam penelitian ini ada temuan yang sama sesuai dengan indikator pada penelitian Micchele E Kembuan, Florence D. J Lengkong.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya

manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. George Edward dalam (Winarno, 2014: 55-88) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Kota Manado ada begitu banyak di tambah dengan puskesmas-puskesmas yang ada tapi dalam melaksanakan tugas mereka belum optimal. Sedangkan Sumber Daya Manusia Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado sangatlah kurang.

Sumber anggaran dalam dalam penanggulangan HIV/AIDS ini juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya dukungan dari anggaran. Anggaran yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan APBD melalui Dinas Kesehatan Kota Manado untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado dinilai masih kurang atau tidak sama sekali.

Sumber Daya Fasilitas merupakan sarana yang sangat menunjang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para ODHA, dan kepada masyarakat yang sukarela ingin melakukan test HIV atau disebut screening.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam penelitian ini didapatkan, disposisi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado

cukup baik, karena melihat komitmen dari Dinas Kesehatan Kota Manado yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas kepada para ODHA dan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Manado selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan yang berkejasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado (KPA) dan LSM yang peduli dengan para ODHA selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap suatu kebijakan. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur kerja ukuran – ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi (Winarno, 2014: 206).

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan dalam suatu kebijakan, karena sudah tugaskan dalam pembagian kerjanya masing-masing. SOP yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Manado mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknik Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Yaitu Dinas Kesehatan melakukan penyampaian informasi tentang HIV/AIDS, deteksi dini (Screening) HIV, pengambilan darah, dan pencatatan laporan kemudian dilaporkan di data base Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) online yang dilaporkan setiap bulannya.

Dalam penelitian ini, tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Manado dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Manado sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kordinasi bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado dan juga LSM yang selalu mendampingi para ODHA. Walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap

diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan HIV/AIDS di Kota Manado sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi antar pelaksana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Manado bersama dengan kelompok sasaran sudah tergolong baik. Hal ini dilihat dari tiga indikator yaitu, penyampaian pesan (transmisi), kejelasan, dan konsisten. Pada Indikator penyampaian pesan (transmisi) informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Manado melalui media, famlet, dan brosur yang disampaikan kepada sasaran kebijakan yaitu kelompok yang beresiko tinggi, komunitas ODHA, pelajar dan masyarakat. Indikator kejelasan komunikasi sudah berjalan sesuai program, yaitu sosialisasi dan pendampingan kepada para ODHA. Indikator konsisten komunikasi dalam yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado, Komisi Penanggulangan AIDS Manado yaitu pemberian obat-obat ARV kepada para ODHA.

2. Sumber daya

Sumber daya yang ada dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado sudah baik, hal ini dilihat dari tiga Indikator yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Indikator sumber daya manusia dengan jumlah tenaga kesehatan yang begitu banyak belum optimal dalam pelaksanaan tugas, dan fungsinya

masing-masing. Namun untuk Komisi Penanggulangan AIDS Manado sendiri masih kekurangan sumber daya manusia. Indikator sumber daya anggaran dalam penanggulangan HIV/AIDS di ambil dari dana Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD). Indikator sumber daya fasilitas ini sudah begitu baik dilihat dari alat-alat kesehatan yang sudah lengkap dan pelayanan kesehatan untuk para ODHA sudah ada.

3. Disposisi

Disposisi atau karakteristik dari pelaksana kebijakan sudah terlihat cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak yang mendukung sepenuhnya program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado. Para pelaksana juga telah memberikan pelayanan yang baik, sopan dan ramah, serta komitmen dari Dinas Kesehatan Kota Manado yang selalu memberikan dukungan dan fasilitas kepada para Orang Dengan AIDS (ODHA) dan masyarakat menjadi salah satu bukti bahwa tenaga pelaksana benar-benar memiliki kemauan dan kepatuhan dalam melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Manado.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah baik, hal ini dilihat dari indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Indikator SOP pada pelaksana kebijakan mengacu pada Standar Minimal Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedang Komisi Penanggulangan AIDS Manado sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional (SOP). Indikator fragmentasi telah berjalan baik karena telah sesuai dengan peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana dalam penyuluhan serta pendampingan kepada para Orang Dengan AIDS (ODHA) di Kota Manado.

Saran

Mendasari kepada hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyampaian pesan harus jelas agar mengenai sasaran kebijakan serta koordinasi antara semua pihak terkait (stakeholder) yang bertanggungjawab harus terjalin dengan baik.
2. Sumber daya yang begitu baik, perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan pendampingan kepada para Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) agar kinerja organisasi berjalan dengan baik.
3. Diharapkan sebagai pelaksana kebijakan selalu memiliki jiwa komitmen yang tinggi, peduli dan tegas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Perlu ditingkatkan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk para Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, D. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. Mulyadi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Tekniks Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

UNAIDS. 2018. Regionscountries of Indonesia (Online) (<https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>). Di akses pada tanggal 2 November 2019.